

**ISU GLOBAL KONVERGENSI IFRS:  
MASALAH PENGUKURAN MENGGUNAKAN  
FAIR VALUE ACCOUNTING**

**John F. Sonoto**

Politeknik PADAMARA Tobelo, Halmahera Utara – Prop Maluku Utara  
fsonoto@yahoo.com

***Abstract***

*This paper aims to describe one of the global issues of IFRS convergence in Indonesia which is the measurement by using the fair value in relation to the information generated based on the qualitative characteristics of information. Globalized development itself requires good accounting standards required by the capital markets or institutions that have an agency problem caused by the problem of distance between the Principle and agent. The phenomenon is then pushed the International Accounting Standards Boards convergence of international accounting standards with IFRS. Financial statements based on historical cost fail to provide early warning signals about the financial difficulties being experienced by financial institutions. Issue is then a very strong incentive to apply the fair value method instead of historical cost.*

**Keywords:** *Convergence of IFRS, fair value, historical cost, characteristics of information.*

**Pendahuluan**

Munculnya *International Financial Reporting Standards* (IFRS) tak bisa lepas dari perkembangan global, terutama yang terjadi pada pasar modal. Perkembangan global yang dimaksud, seperti perkembangan teknologi informasi (TI) di lingkungan pasar yang terjadi begitu cepat sehingga dengan sendirinya berdampak pada banyak aspek di pasar modal, mulai dari model dan standar pelaporan keuangan, relativisme jarak dalam pergerakan modal, hingga ketersediaan jaringan informasi ke seluruh dunia. Kecanggihan TI sangat memungkinkan jutaan pasar modal atau bahkan miliaran investasi dapat dengan mudah masuk ke rantai pasar modal di seluruh penjuru dunia. Pergerakan investor tak bisa dihalangi oleh teritorial suatu negara. Perkembangan yang mengglobal seperti ini dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki *agency problem*.

Pada 1982, *International Financial Accounting Standard* (IFAC) mendorong IASC sebagai standar akuntansi global. Hal yang sama dilakukan Federasi Akuntan Eropa pada 1989. Pada 1995, negara-negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menggunakan IAS. Setahun kemudian, US-SEC (Badan Pengawas Pasar Modal AS) berinisiatif untuk mulai mengikuti GAS.

Pada 1998 jumlah anggota IFAC/IASC mencapai 140 badan/asosiasi yang tersebar di 101 negara. Akhirnya, pertemuan menteri keuangan negara-negara yang tergabung dalam G-7 dan Dana Moneter Internasional pada 1999 menyepakati dilakukannya penguatan struktur keuangan dunia melalui IAS. Pada 2001, dibentuk IASB sebagai IASC. Tujuannya untuk melakukan konvergensi ke GAS dengan kualitas yang meliputi prinsip-prinsip laporan keuangan dengan standar tunggal yang transparan, bisa dipertanggung jawabkan, *comparable*, dan berguna bagi pasar modal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

IASC dibentuk pada 1973 oleh badan-badan atau asosiasi-asosiasi profesi dari negara-negara Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, dan Inggris. Komite ini kemudian menyepakati standar akuntansi internasional yang dikenal sebagai IAS. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya IFRS. *Agency Problem* adalah masalah jarak antara *principle* dan *agent* yang dalam relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut *agency relation*, yaitu informasi. Informasi adalah berupa laporan tentang *aset, resources*, dan lainnya yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang dibuat oleh *agent* dan diserahkan kepada *principles* (pemilik). Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan baik antara *principles* dan *agent* disebut *agency cost*. Fenomena inilah yang kemudian mendorong *International Accounting Standard Committee* (IASB) melakukan percepatan harmonisasi standar akuntansi internasional melalui apa yang disebut IFRS.

Salah satu dampak IFRS pada pengukuran Sistem dan Pelaporan Akuntansi adalah dengan menggunakan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud dan aset keuangan. Dengan demikian dibutuhkan sebuah pemahaman yang terkait dengan masalah pengukuran nilai wajar (*fair value*) dan karakteristik kualitatif informasi.

## Pembahasan

### Definisi dan Perkembangan Nilai Wajar

Campbell *et al.* (2008) menyatakan bahwa akuntansi nilai wajar merupakan praktek akuntansi suatu nilai aset dan kewajiban tertentu pada nilai pasar saat ini. Ia menambahkan bahwa akuntansi nilai wajar secara teoritis ingin menunjukkan dan melaporkan nilai sekarang dari arus kas masa mendatang yang berhubungan dengan aset dan kewajiban. Nilai wajar adalah harga yang dapat diterima ketika menjual aset atau membayar kewajiban yang terjadi pada transaksi wajar antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran (FASB, 2006). Sedangkan menurut PSAK No. 50 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006<sup>a</sup>), nilai wajar merupakan dasar yang netral untuk menilai tanggung jawab manajemen dengan mengindikasikan pengaruh keputusannya untuk membeli, menjual, atau memiliki aset keuangan dan untuk menimbulkan, mempertahankan, atau melepaskan kewajiban keuangan.

*Fair value accounting* disebut juga *market-to-market* (AICPA Media Center, 2009) yang didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengukur aset dan kewajiban yang muncul pada laporan keuangan perusahaan. Sehingga secara teoritis dapat dikatakan bahwa akuntansi nilai wajar berusaha menggambarkan dan melaporkan nilai sekarang arus kas masa depan yang berhubungan dengan

aset dan kewajiban. Relevansi laporan keuangan berbasis *historical cost* merupakan titik kontraversi yang kemudian menyebabkan penggantian basis menuju nilai wajar.

Kerugian akibat krisis kredit perbankan yang dialami oleh sejumlah pemegang saham, institusi keuangan di Amerika Serikat diduga kuat yang menjadi penyebabnya adalah ketidakandalan laporan keuangan berbasis *historical cost*. Para investor menyatakan bahwa laporan keuangan berbasis *historical cost* gagal memberikan sinyal atau peringatan awal mengenai kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh institusi keuangan. Isu inilah yang kemudian menjadi pendorong yang sangat kuat untuk menerapkan metode nilai wajar sebagai pengganti *historical cost* ketika sektor perumahan yang telah menjadi mesin penggerak ekonomi Amerika Serikat pada dekade 90-an mengalami krisis keuangan. Kejatuhan sektor perumahan menghasilkan reaksi dahsyat pada seluruh perekonomian global karena banyak bank-bank bertaraf internasional yang menempatkan uangnya pada sekuritisasi kompleks dalam pasar sub-primer. Dengan kondisi perekonomian AS yang digolongkan berada dalam resesi, dunia akan menerima dampaknya karena perekonomian AS mengendalikan perekonomian dunia akibat tingkat konsumsinya yang tinggi (Khan, 2008).

Butar-Butar (2004) menyatakan bahwa seperti halnya suatu produk, metode nilai wajar juga menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Pihak-pihak yang mendukung standar nilai wajar mengajukan tiga alasan penting, bahwa:

1. Akuntansi nilai wajar lebih akurat dan relevan dibandingkan dengan *historical cost* dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk menempatkan sumber-sumber daya yang dimilikinya.
2. Tidak dimungkinkan lagi untuk melakukan praktik *gains trading*, yakni menjual aset yang berkualitas tinggi untuk merealisasikan laba dan menahan aset yang berkualitas rendah untuk menghindari kerugian. Bank tidak dapat lagi melakukan manajemen laba dengan menjual sekuritas yang nilai pasarnya tinggi dan menahan sekuritas yang mengalami penurunan harga.
3. Akuntansi nilai wajar mampu merefleksikan perubahan kondisi keuangan yang diakibatkan dari fluktuasi tingkat bunga.

Butar-Butar (2004) juga menyatakan pihak-pihak yang menentang akuntansi nilai wajar mengajukan tiga alasan, bahwa:

1. Akuntansi nilai wajar meningkatkan volatilitas laba dan modal.
2. Akuntansi nilai wajar dianggap tidak objektif.
3. Penerapan akuntansi nilai wajar menyebabkan institusi keuangan berorientasi jangka pendek karena sekuritas yang berjangka pendeklah yang tidak mengalami fluktuasi. Nilai wajar memiliki prinsip bahwa aset dan kewajiban dinilai atas dasar harga yang berlaku saat itu. Kritik lain diungkapkan bahwa nilai wajar mengandung kelemahan dalam objektivitas nilai suatu aset. Misalnya pertanyaan tentang: berapakah nilai wajar atau nilai terkini untuk sebuah mesin yang telah dimiliki puluhan tahun?, apakah memiliki dasar objektif sehingga aset tersebut tidak dinilai terlalu tinggi dan terlalu rendah? Hal ini mungkin saja dilakukan jika pasar bekas (*second-hand-market*) untuk

mesin dengan kondisi yang sama tersedia. Jika tidak ada maka harus memakai jasa penilai dan dasar ini tidak objektif.

Sekalipun mungkin akhir-akhir ini khususnya menjelang tahun penerapan IFRS di Indonesia pada tahun 2012 tidak terdengar lagi perdebatan sengit tentang perbedaan *historical cost* dan nilai wajar (*fair value*), bukan berarti isu ini dianggap selesai. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkembangan saat ini motivasi penggunaan nilai wajar lebih didukung dengan adanya pergerakan harmonisasi standar internasional yang dilakukan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Harmonisasi standar ini dilakukan dengan memperbaharui standar berbasis nilai wajar pada tahun 2004, 2006, dan 2007 dalam IAS 39 (*Financial Instruments: Recognition and Measurement*), IAS 40 (*Investment property*), dan IAS 41 (*Agriculture*) (Campbell *et al.*, 2008).

Perkembangan proses harmonisasi untuk masalah nilai wajar juga terjadi di Indonesia yaitu pada penerapan PSAK No. 50 dan No. 55. Kedua standar ini diharapkan dapat mendorong perbankan agar dapat membuat laporan keuangan secara lebih wajar dan informatif. PSAK No. 50 yang dikeluarkan tahun 2006 adalah tentang instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan PSAK No. 55 tahun 2006 tentang instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran. Namun pihak perbankan telah mengajukan penundaan penerapan kedua standar tersebut selama satu tahun karena ketatnya likuiditas perbankan berkaitan dengan krisis finansial global yang turut berdampak pada perekonomian di Indonesia (Bisnis Indonesia, 2009).

### **Pengukuran Nilai Wajar**

*Financial Accounting Standards Board* (FASB) mengeluarkan SFAS No. 157 tentang "Pengukuran *Fair Value*," yang bertujuan mendefinisikan nilai wajar, membangun suatu kerangka untuk mengukur nilai wajar, dan memperluas pengungkapan tentang pengukuran nilai wajar (FASB, 2006). Bhamornsiri *et al.* (2009) menyatakan bahwa pernyataan dalam SFAS No. 157 memberikan panduan untuk menentukan nilai wajar aset dan kewajiban dan membutuhkan pengungkapan informasi tentang:

1. Sejauh mana perusahaan mengukur aset dan kewajiban sebesar *fair value*;
2. Informasi yang digunakan untuk menghitung nilai wajar; dan
3. Efek pengukuran *fair value* terhadap laba.

Sedangkan menurut Henry *et al.* (2007), SFAS No. 157 dikeluarkan untuk memberikan pedoman dalam pelaporan aset dan kewajiban pada nilai wajar serta meningkatkan konsistensi dalam penerapan pengukuran nilai wajar. SFAS No. 157 kembali mengundang perdebatan antara pendukung pengukuran *historical cost* dan pendukung pengukuran *fair value* dalam laporan keuangan. Salah satu argumen paling menarik dari pendukung akuntansi *fair value* adalah laporan keuangan *historical cost* tidak memberikan informasi yang relevan kepada investor.

Pernyataan SFAS No. 157 lebih menekankan pada *input* yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Secara spesifik, *input* nilai wajar seharusnya berdasar pada informasi yang tepat waktu, dihasilkan dari sumber independen dan

digunakan oleh pelaku pasar dalam penetapan keputusan harga (Campbell *et al.*, 2008). Faktor penentu kualitas *input* adalah:

1. *Input* dapat diobservasi dan tidak dapat diobservasi,
2. Berdasarkan pada aset dan hutang sejenis yang ingin dinilai,
3. Diturunkan dari pasar aktif atau tidak aktif, dan
4. *Input* yang tidak dapat diobservasi yang didukung oleh data pasar lainnya.

SFAS No.157, *Fair value measurements* digunakan untuk aset dan kewajiban tertentu. Pengukuran ini mengasumsikan bahwa aset dan kewajiban dipertukarkan pada suatu transaksi wajar antara pelaku pasar ketika menjual aset atau menyelesaikan kewajiban pada tanggal pengukuran. Teknik penilaian yang digunakan konsisten dengan 3 pendekatan, sebagai berikut:

1. Pendekatan Pasar

Dalam pendekatan ini menggunakan harga dan informasi relevan lainnya yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset dan kewajiban yang sejenis atau dapat dibandingkan. Salah satu contohnya teknik penilaian yang konsisten pada *matrix pricing*. *Matrix pricing* merupakan teknis matematis yang digunakan untuk menilai sekuritas kewajiban yang lebih bergantung pada hubungan sekuritas dengan batas kuota sekuritas lainnya.

2. Pendekatan pendapatan

Pendekatan pendapatan menggunakan teknik penilaian dengan mengkonversi nilai masa depan (contohnya arus kas atau laba) ke dalam nilai sekarang. Teknik penilaian ini termasuk teknik *present value*; *option pricing models* seperti formula *Black-Scholes-Merton*, model binomial, dan metode *multiperiod excess earnings* untuk mengukur nilai wajar aset tak berwujud.

3. Pendekatan biaya

Pendekatan ini berdasarkan pada jumlah yang sekarang dapat diperoleh untuk mengganti kapasitas aset (atau seringkali mengarah pada *current replacement cost*).

Untuk meningkatkan komparabilitas dan konsistensi dalam pengukuran ini, SFAS No. 157 menyediakan suatu hirarki nilai wajar (Wolk *et al.*, 2008). Hirarki nilai wajar memprioritaskan pada *input* untuk mengukur nilai wajar ke dalam tiga tingkatan. Tiga tingkatan dalam hirarki pengukuran nilai wajar, adalah:

1. *Level 1 inputs*

Tingkatan ini merupakan harga kuota (tidak disesuaikan) untuk aset dan kewajiban sejenis yang dilaporkan entitas yang memiliki kemampuan mengakses dalam pasar aktif pada tanggal pengukuran (FASB, 2006). Tingkat ini mengidentifikasi prioritas tertinggi untuk *input* yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar. Kualitas *input* sangat optimal, yaitu *inputnya observable* atau berdasarkan pada data pasar yang diperoleh dari sumber independen dari entitas pelaporan. *Input* juga diperoleh dari pasar aktif ketika harga kuota siap dan tersedia untuk digunakan (Campbell *et al.*, 2008).

2. *Level 2 inputs*

*Input* pada tingkat ini merupakan kuota harga lainnya yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban, baik langsung maupun tidak langsung. Jika aset atau kewajiban berada pada suatu perjanjian

khusus, *input* pada tingkat ini harus dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban yang penuh secara substansinya. Pada level ini mencakup:

- a. Harga kuotasi untuk aset dan kewajiban sejenis dalam pasar aktif;
- b. Harga kuotasi untuk aset dan kewajiban sejenis dalam pasar yang tidak aktif, dapat dikatakan bahwa hanya terdapat beberapa transaksi untuk aset dan kewajiban. Jika harga tidak diperbaharui, atau harga beragam secara substansial sepanjang waktu atau di antara pelaku pasar, atau dalam kondisi sedikit informasi yang dipublikasi;
- c. *Input* selain harga kuotasi dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban;
- d. *Input* diturunkan dari data pasar yang dapat diobservasi dengan hubungan atau pengertian lainnya (FASB, 2006).

### 3. *Level 3 inputs*

Pada tingkatan ini, *input* tidak dapat diobservasi untuk aset dan kewajiban. *Input* yang tidak dapat diobservasi dapat dikembangkan dari informasi terbaik yang tersedia dalam suatu kondisi, dan mungkin mencakup data entitas pelaporan itu sendiri (FASB, 2006). *Unobservable inputs* diperoleh dari sumber yang tidak independen tetapi diturunkan dari ekstrapolasi atau interpolasi. Kritisnya, *input* ini tidak dapat dihasilkan dari data pasar lainnya. Tingkatan hirarki ini menyajikan prioritas terendah dalam kombinasi *input* yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar (Campbell *et al.*, 2008).

### SFAS No. 157 dan PSAK No. 55 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2006)

SFAS No. 157 yang diterbitkan FASB pada 15 September 2006, dan PSAK No. 55 dikeluarkan pada 16 Desember 2006. Rentang waktu terbitnya kedua standar yang cukup pendek, namun tidak semata-mata mendorong persamaan pada kedua standar akuntansi tersebut. SFAS No. 157 merupakan standar akuntansi yang ditujukan hanya untuk aset dan kewajiban tertentu. Sementara itu, PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) mencakup perlakuan akuntansi untuk aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan *item* nonkeuangan.

SFAS No. 157, *input* pengukuran dipertimbangkan melalui suatu hirarki pengukuran, sedangkan pada PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) hanya menjelaskan menggunakan teknik penilaian untuk harga kuotasi di pasar aktif atau tidak aktif. Menurut PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>), bukti terbaik dari nilai wajar adalah harga kuotasi di pasar yang aktif. Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, entitas menetapkan nilai transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan dan model penetapan harga opsi.

Selanjutnya perlu diperhatikan ketegasan yang terdapat dalam IAS 39/PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) yang mengatur masalah pengukuran ke dalam beberapa hal, yakni: Pengukuran awal, Pengukuran setelah pengukuran awal, Pertimbangan dalam pengukuran nilai wajar, Reklasifikasi, Keuntungan dan kerugian serta Penurunan nilai dan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) terdapat hal mendasar yang telah di revisi dari PSAK No. 55 (1998) yakni jika PSAK No. 55 (1998) instrumen keuangan pengukuran nilai

awalnya didasarkan pada biaya historis maka pada PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) pengukuran nilai awal instrumen keuangannya berdasarkan nilai wajar (Aminullah, 2007).

Sebagai tindak lanjut dalam menghadapi krisis global, DSAK mengesahkan Buletin Teknis No. 3 tentang Penentuan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Ketika Pasar Tidak Aktif pada 10 Desember 2008. Buletin ini membahas hirarki pengukuran nilai wajar pada kondisi pasar tidak aktif, serta membahas pengukuran nilai wajar dengan teknik penilaian yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Referensi yang digunakan dalam Buletin Teknis ini adalah PSAK, *IASB Expert Advisory Panel, Measuring and Disclosing the Fair Value of Financial Instruments in Market that are No Longer Active* pada Oktober 2008, dan *SEC Office of the Chief Accountant and FASB Staff Clarifications On Fair Value Accounting* pada 30 September 2008. Penggunaan referensi ini diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (IAI, 2008).

Penentuan nilai wajar tergantung pada fakta dan keadaan dan memerlukan pertimbangan yang signifikan. Terlepas dari teknik penilaian yang digunakan, entitas harus memasukkan penyesuaian risiko yang sesuai dengan yang akan dilakukan pelaku pasar, misalnya untuk kredit dan likuiditas. Ketika pasar tidak aktif, pengukuran nilai wajar dapat dilakukan berdasarkan estimasi internal manajemen, harga transaksi instrumen keuangan yang sama atau serupa, kuotasi broker, jasa penentuan harga efek, kalibrasi, penyesuaian penilaian, dan teknik penilaian (IAI, 2008).

### **Pengukuran Nilai Wajar dan Kualitas Informasi**

Informasi nilai wajar digunakan secara luas untuk tujuan bisnis dalam menentukan posisi keuangan entitas secara keseluruhan dan dalam pengambilan keputusan mengenai instrumen keuangan secara individual (IAI, 2006<sup>b</sup>). Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang dan semakin kompetitif, pengukuran dengan nilai wajar menjadi kebutuhan utama. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Day (2000) dalam (Anggriani, 2009), bahwa:

1. Ekonomi telah menjadi dinamis, maka kebutuhan akan jumlah nilai wajar yang reliable menjadi semakin penting.
2. Staf SEC dan badan pengatur tertentu telah melihat masalah-masalah yang berasal dari estimasi nilai wajar yang tidak dapat dipercaya.
3. Selama beberapa tahun, penyusunan standar telah menghendaki pengukuran aset dan kewajiban pada nilai wajar tanpa menyediakan rincian mengenai bagaimana pedoman penilaian dan pengauditan untuk mengestimasi nilai wajar tersebut.
4. Berbagai proyek akuntansi sekarang sedang berlangsung menghendaki lebih banyak aset dan kewajiban untuk diukur pada nilai wajar.

Hal lain yang dapat dikatakan baru pada PSAK No. 55 (IAI, 2006<sup>b</sup>) ialah aturan mengenai pilihan nilai wajar. Jika pada PSAK No. 50 (1998) instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar hanya instrumen keuangan dengan tujuan untuk diperdagangkan namun dengan adanya pilihan nilai wajar, perusahaan diperbolehkan untuk menetapkan instrumen keuangan di luar

keperluan *trading* (PSAK No. 55 revisi 2006 par. 8). Contohnya, pada laporan keuangan portofolio *trading-bond* didanai oleh *repurchase agreement*, di mana aset dinilai dengan *fair value* sedangkan kewajiban dinilai dengan *amortized cost*. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan kewajibannya untuk diukur dengan nilai wajar (Aminullah, 2007).

Ronen (2008) menyatakan bahwa tujuan informasi adalah mempermudah memprediksi masa depan arus kas dan besarnya, waktu dan ketidakpastiannya adalah berasal dari investor yang berkeinginan untuk meramalkan masa depan pergerakan harga pasar dan mengidentifikasi situasi mana yang tidak sesuai antara harga aktual dan pada hakekatnya atau nilai yang mendasarinya. Belakangan ini risiko-biasa nilai potongannya berdasarkan arus kas perusahaan pembeli. Perhitungan seperti itu membutuhkan informasi yang relevan sehingga akan bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya supaya informasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang dan menegaskan atau memperbaiki harapan yang dibuat sebelumnya.

Informasi juga harus tersedia tepat waktu bagi pengambil keputusan sebelum mereka kehilangan kemampuan mempengaruhi keputusan yang diambil (*timeliness*) (FASB, 1997<sup>b</sup>). Para pendukung nilai wajar percaya bahwa estimasi yang dihasilkan akan membawa pelaporan keuangan lebih relevan dan semakin jelas. Nilai wajar juga memberikan gambaran ekonomi lebih baik dibandingkan *historical cost* (Campbell *et al.*, 2008). Informasi nilai wajar relevan terhadap berbagai keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan karena, di beberapa situasi dan kondisi, informasi tersebut mencerminkan pertimbangan pasar keuangan tentang nilai kini atas perkiraan arus kas masa depan yang berasal dari instrumen (IAI, 2006<sup>b</sup>).

Barth (1994) melakukan penelitian terhadap relevansi nilai wajar, dia ingin menguji apakah estimasi nilai wajar sekuritas, pinjaman, dan hutang jangka panjang lebih relevan bagi investor dibandingkan dengan nilai buku. Hasilnya ditemukan bahwa estimasi nilai wajar mampu menerangkan variasi harga saham bank lebih baik dibandingkan nilai buku. Sedangkan Campbell *et al.* (2008) mengemukakan pada keadaan perekonomian sekarang yang secara finansial banyak ditopang oleh investor. Pelaporan estimasi nilai wajar dan pengungkapan dalam jangkauan hasil yang mungkin didapat mungkin akan membantu investor yang *sophisticated*, namun untuk investor yang *unsophisticated* hanya akan memberikan gangguan informasi dalam bentuk ketidaktepatan dan informasi yang berlebihan.

Pada kondisi pasar aktif, informasi dapat dikatakan relevan karena tersedia tepat waktu sehingga dapat digunakan memprediksi masa depan dan memperbaiki harapan sebelumnya. Namun dalam kondisi pasar tidak aktif, meski tersedia tepat waktu, informasi belum tentu dapat digunakan untuk mempengaruhi keputusan investasi. Hal ini disebabkan tidak adanya nilai prediktif dalam informasi sehingga kurang berguna untuk mengevaluasi harapan yang dibuat sebelumnya.

Informasi dikatakan *reliable* jika memiliki kemampuan menggambarkan secara wajar keadaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, *verifiable* dan netral. Informasi nilai wajar dianggap netral karena difokuskan memenuhi kebutuhan umum pemakai bukan hanya kebutuhan pihak tertentu. Namun terkait



dengan *verifiability* dalam kondisi nilai wajar aset dan kewajiban harus diestimasi, ada kemungkinan informasi yang dihasilkan tidak *verifiable*. Menurut SFAC No. 2, keterujian digambarkan dengan adanya suatu kesepakatan di antara pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Namun, poin paling penting adalah kebenaran informasi yang dihasilkan, bukannya ketepatan metode pengukuran yang digunakan. Estimasi nilai wajar mungkin saja tidak *verifiable* dalam kondisi tertentu (misalnya dalam kondisi pasar tidak aktif) jika beberapa *input* dalam metode pengukuran tidak teruji kebenarannya. Kondisi ini dapat terjadi jika pengukuran nilai wajar berdasarkan estimasi internal manajemen karena terdapat kemungkinan pertimbangan subjektivitas informasi yang dapat menguntungkan perusahaan.

Menilik pada kualitas informasi relevansi dan reliabilitas, dalam pengukuran nilai wajar juga terjadi kendala *trade off*. Ketika informasi menggambarkan secara wajar realitas ekonomi yang terjadi sebenarnya, informasi tersebut mungkin berkurang relevansinya. Kaitan karakteristik relevansi ini terutama karena berkurangnya kualitas informasi dalam mempengaruhi keputusan pengguna. Informasi yang dihasilkan mungkin saja tidak dapat memenuhi adanya suatu nilai prediktif dan tidak dapat memberikan suatu koreksi harapan yang dibuat sebelumnya. Keadaan ini dapat terjadi pada pengukuran nilai wajar pada pasar yang tidak aktif. Relevansi dan reliabilitas seringkali berpengaruh satu sama lain. *Trade off* antara relevansi dan reliabilitas juga dibahas dalam SFAC No. 2. Dalam SFAC No. 2 disebutkan bahwa informasi dapat bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa tentang perusahaan lain dan informasi yang sama untuk periode lain atau dalam beberapa titik periode lainnya. Nilai wajar dianggap memenuhi aspek komparabilitas karena nilai wajar aset dan kewajiban bergantung hanya pada karakteristik aset atau kewajiban, bukan pada karakteristik entitas yang memegang aset dan kewajiban atau ketika diperoleh.

Dalam kondisi pasar tidak aktif, perusahaan mungkin dapat menggunakan metode lain yang berbeda dari metode sebelumnya dalam estimasi *input*. Keleluasaan tersebut dapat terjadi sesuai dengan kebijakan pembuat standar namun tetap harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perusahaan dapat menggunakan teknik penilaian estimasi *input* yang menguntungkan bagi perusahaan. Teknik penilaian *input* yang digunakan pada perusahaan yang satu dan lainnya mungkin saja berbeda sehingga aspek komparabilitas menjadi berkurang manfaatnya. Dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak aktif, perusahaan yang mengubah pemakaian metode seharusnya mengungkapkan pemakaian metode yang digunakan sekarang dan pada periode selanjutnya. Perlakuan ini sesuai dengan konsistensi dalam karakteristik kualitatif informasi.

Informasi akuntansi diharapkan mempunyai manfaat yang melebihi biaya yang diperlukan untuk memperolehnya (FASB, 1997<sup>a</sup>). Fenomena yang terjadi pada pasar tidak aktif memberikan kesulitan penyajian informasi laporan keuangan perusahaan. Aset yang diukur pada nilai wajar menyebabkan nilainya dalam laporan keuangan menjadi turun. Biaya yang harus dipertimbangkan dalam penyajian laporan keuangan meningkat akibat penggunaan metode ini, sedangkan manfaat yang diterima belum tentu melebihi biayanya. Manfaat yang berkurang terutama disebabkan karena gambaran keuangan perusahaan yang dinilai buruk.

Kemungkinan kondisi tersebut juga terkait dengan materialitas sebagai salah satu pertimbangan apakah suatu informasi mempengaruhi keputusan yang diambil. Walaupun tidak ada aturan besarnya tingkat materialitas, namun materialitas dapat terjadi jika peniadaan atau kesalahan penyajian informasi tersebut dapat menyebabkan terpengaruhnya pertimbangan rasional. Pernyataan ini sesuai dengan konsep SFAC No.2. Sebagai contoh dalam kasus kualitas kredit, kondisi pasar yang tidak aktif seperti saat ini menyebabkan perusahaan yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membayar mungkin menjadi tidak bisa menikmati fasilitas kredit perbankan karena *outlook* laporan keuangannya yang tidak mendukung. Penggunaan pengukuran nilai wajar dalam kasus tersebut menyebabkan manfaat utama yang dirasakan perusahaan menjadi berkurang dan biaya kehilangan fasilitas kredit besar. Namun jika terdapat kesalahan dan informasi ditiadakan maka akan timbul kendala materialitas. Inilah yang mencerminkan keterbatasan dalam penyajian laporan keuangan.

### **Konvergensi IFRS di Indonesia**

Apakah Indonesia harus beralih ke IFRS? Selama ini, dunia mengenal beberapa standar akuntansi. Amerika Serikat, misalnya, yang skala perekonomiannya terbesar di dunia, masih memakai US GAAP (*United States General Accepted Accounting Principles*), juga FASB (*Financial Accounting Standard Board*). Negara-negara yang tergabung di Uni Eropa, termasuk Inggris, menggunakan *International Accounting Standard (IAS)* dan *International Accounting Standard Board (IASB)*. Indonesia setelah berkiblat ke Belanda, belakangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga pada tanggal 23 Desember 2008, IAI telah mencanangkan konvergensi PSAK ke IFRS secara penuh pada tahun 2012. Demikian juga dengan kesepakatan G-20 di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009 yang diantaranya menyatakan bahwa otoritas yang mengawasi peraturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan peraturan di antara negara-negara anggota G-20.

Di tiap kawasan, penyusunan standar akuntansi selalu melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang. Di AS, misalnya, pada awalnya standar akuntansi ditentukan oleh masing-masing manajemen perusahaan dengan pertimbangan yang membutuhkan standar tersebut memang pihak manajemen. Era berganti, standar kemudian ditentukan kalangan profesi yang tergabung dalam asosiasi. Pertimbangannya, pihak profesilah yang bertugas menyusun dan mengaudit laporan keuangan. Barulah, yang mutakhir, yang diacu adalah US GAAP yang dibuat oleh FASB. Saat ini, terdapat dua kekuatan besar di bidang standar akuntansi, yaitu US-GAAP dan IFRS yang sebelumnya dikenal sebagai *International Accounting Standard Committee (IASC)*.

Isu nilai wajar bukanlah sesuatu yang baru, tetapi isu klasik yang muncul kembali. Meskipun bukan isu baru, nilai wajar tetap memberikan signifikansi terhadap informasi keuangan. Menilik pada kemampuan laporan keuangan dalam memberikan informasi pada investor dan pengguna lainnya tidak terlepas dari karakteristik kualitatif informasi dari laporan keuangan itu sendiri (Butar-Butar,

2004). Nilai wajar dianggap memiliki keunggulan dalam menggambarkan kondisi sebenarnya pada pasar. Namun ternyata angka-angka akuntansi yang dihasilkan masih berpotensi rentan terhadap manipulasi dan kesalahan estimasi (Siahaan, 2009). Hal terpenting saat ini bukanlah perdebatan pro dan kontra nilai wajar melainkan bagaimana menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk investor dan pengguna lainnya.

### Simpulan

Pergerakan investor tak bisa dihalangi oleh teritorial suatu negara. Perkembangan yang mengglobal seperti ini dengan sendirinya menuntut adanya satu standar akuntansi yang dibutuhkan baik oleh pasar modal atau lembaga yang memiliki *agency problem*. Masalah jarak antara *principle* dan *agent* yang dalam relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut *agency relation*, yaitu informasi. Informasi adalah berupa laporan tentang *aset*, *resources*, dan lainnya yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang dibuat oleh *agent* dan diserahkan kepada *principles* (pemilik). Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan baik antara *principles* dan *agent* disebut *agency cost*. Fenomena inilah yang kemudian mendorong *International Accounting Standard Commitee* (IASC) melakukan percepatan harmonisasi standar akuntansi internasional melalui apa yang disebut IFRS.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dibutuhkan keputusan pengukuran yang berdampak pada *output* karakteristik kualitatif informasi. Kunci utama pengukuran nilai wajar adalah kondisi pasar aktif dan tidak aktif. Dalam kondisi pasar aktif, informasi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas relevan, reliabel, dapat dibandingkan dan konsistensi. Ketika kondisi pasar tidak aktif, informasi yang disajikan menjadi tidak *fair*, kurang memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Komparabilitas juga terganggu karena kemungkinan penggunaan teknik penilaian estimasi *input* yang berbeda namun tetap dapat memenuhi kualitas konsistensi dengan adanya pengungkapan. Pengukuran ini juga dapat menyebabkan nilai aset menurun dalam kondisi pasar tidak aktif sehingga perlu pertimbangan *cost and benefit* serta materialitas dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

So dan Smith (2009) dalam penelitian mereka membuktikan bahwa nilai relevansinya atas penyajian perubahan *fair value* pada *income statement* perusahaan-perusahaan *properties industry* yang *listed* di Hongkong hasilnya signifikan bahwa harga pasar bereaksi kepada investasi *properties* nilai wajar perubahan informasi termasuk hasil laporan pengumuman. Hasil tersebut juga menunjukkan signifikan asosiasi antara laporan penyesuaian atas saham dan penyajian *investment properties* perubahan nilai wajar pada *income statement*. Menurut mereka, hasil penelitian *mensupport* literatur yang ada bahwa penyajian *value relevance* memiliki tempat pada sejumlah akuntansi umumnya. Hasil dari studi tersebut berimplikasi pada semua perusahaan di dunia untuk mempersiapkan *financial statementnya* menggunakan IFRS.

### Daftar Rujukan

- Aminullah, J. 2007. *Implikasi Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 Revisi 2006 Pada Institusi Perbankan: Sebuah Sru di Literatur*. Skripsi Digital, FEUI. (Diunduh tanggal 11 April 2011).
- AICPA Media Center. Februari 2009. FAQs About Fair Value Accounting. ([www.cpa2biz.com](http://www.cpa2biz.com), diunduh tanggal 9 April 2011).
- Akuntan Indonesia, 2009, *Konvergensi IFRS di Indonesia*, Edisi No.17, ([www.mideta.co.cc](http://www.mideta.co.cc), diunduh tanggal 10 April 2011).
- Anggriani, F.R.R. 2009. *Nilai Wajar Saham Pada Kualitas Laba*. Majalah digital Manajemen dan Bisnis (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta). 8 (1).
- Butar-Butar, S. 2004. *Kontroversi Penerapan Fair Value Accounting: Suatu Tinjauan Historis dan Empiris*. VISI Edisi XII.
- Bisnis Indonesia, 2009, PSAK No. 50 dan No.55 Ditunda Setahun, terbitan 6 Januari. (Diunduh tanggal 10 April 2011).
- Bhamornsiri, S., R.E. Guinn, dan R.G. Schroeder, 2009, *The Economic Impact of SFAS NO. 157*, International Atlantic Economic Society. (Online). (Diunduh 28 October 2009).
- Campbell R.L., L. Jackson, A. Ownes, dan D.R. Robinson. 2008, *Fair Value Accounting From Theory To Practice, Implementation of SFAS No. 157 Will Be Tumultuous, Painful, And Require Significant Adjustment For U.S. Accounting Professionals*.
- Financial Accounting Standards Board. 1997<sup>a</sup>. *Statements of Financial Accounting Concepts No.1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. Connecticut: John Wiley and Sons Inc. (diunduh tanggal 11 April 2011).
- Financial Accounting Standards Board. 1997<sup>b</sup>. *Statements of Financial Accounting Concepts No. 2: Qualitative Characteristics of Accounting Information*. Connecticut: John Wiley and Sons Inc. (diunduh tanggal 10 April 2011).
- Financial Accounting Standards Board. 2006. *Statements of Financial Accounting Standards No. 157: Fair Value Measurements*, Connecticut, didownload tanggal 10 April 2011.
- Henry, E., O.J. Holzmann dan Y. Yang. 2007. FASB Departement, *Mitigating the Volatility of Reported Earnings: SFAS 159*, Inc. Published online in Wiley InterScience ([www.interscience.wiley.com](http://www.interscience.wiley.com), diunduh). pp. 85-88.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006<sup>a</sup>. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 50 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan*. Jakarta. (Diunduh tanggal 10 April 2011).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2006<sup>b</sup>. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 55 (Revisi 2006): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Jakarta. (Diunduh tanggal 10 April 2011).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Buletin Teknis No. 3: Penentuan Nilai Wajar Instrumen Keuangan Ketika Pasar Tidak Aktif*. Jakarta. (diunduh tanggal 10 April 2011).

- Khan. 2008. Krisis Kredit Global, (<http://business.guardian.co.uk/story/0,,2182836,00.html>, diunduh tanggal 10 April 2011).
- Ronen, J. 2008. *To Fair Value Or Not To Fair Value: A Broader Perspective*. Abacus. 44 (2).
- Siahaan, H. 2009. *Implikasi Dan Permasalahan Dalam Mengimplementasikan Konsep Nilai Wajar Dalam Kondisi Ekonomi Saat Ini, Permasalahan Dalam Penerapan Konsep Fair Value Accounting (Termasuk Mark-To-Market) Pada Kondisi Krisis Keuangan Global*.
- So, S., dan M. Smith. 2009. *Value-relevance of presenting changes in fair value of investment properties in the income statement: evidence from Hong Kong*. *Accounting and Business Research*. 39 (2): pp. 103-118.
- Sonoto J. 2010. *Permasalahan Dalam Pengukuran Dan Pengungkapan Fair Value Accounting*. Makalah Teori Akuntansi tidak dipublikasikan. Magister Sains Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Wolk, H.I., J.L. Dodd, dan J.J. Rozycki. 2008. *Accounting Theory: Conceptual Issues In A Political And Economic Environment*. Edisi 7<sup>th</sup>. Sage Publications, Inc.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan